

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM KONTRAK TERHADAP KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI INDONESIA

Marani

Dusun Sebasung, Desa Merabuan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas

Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) play a vital role in the Indonesian economy. However, SMEs often face challenges in contract enforcement that can affect their business performance. This study aims to analyse the effect of contract law enforcement on the performance of SMEs in Indonesia. The method used is a qualitative approach with in-depth interviews with SMEs and business law experts. The results show that weak contract law enforcement, such as uncertainty in dispute resolution and the length of the litigation process, negatively impacts SME performance. This hinders SMEs' access to finance, reduces trust in business partnerships, and increases transaction costs. The study concludes that reforms in the contract law enforcement system, such as strengthening alternative dispute resolution mechanisms and improving the capacity of judicial institutions, are needed to support the growth and competitiveness of SMEs in Indonesia.

Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, UKM seringkali menghadapi tantangan dalam penegakan hukum kontrak yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penegakan hukum kontrak terhadap kinerja UKM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pelaku UKM dan ahli hukum bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum kontrak yang lemah, seperti ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa dan lamanya proses litigasi, berdampak negatif terhadap kinerja UKM. Hal ini menghambat akses UKM terhadap pembiayaan, mengurangi kepercayaan dalam kemitraan bisnis, dan meningkatkan biaya transaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum kontrak, seperti penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan, untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing UKM di Indonesia.